



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, setiap tahun disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Biro pada Sekretariat Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD (Rencana Kerja Perangkat daerah) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berupaya untuk menyelaraskan berbagai hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan dengan Mengacu pada program yang telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra), guna mencapai kinerja yang diinginkan berdasarkan indicator kinerja yang ada pada setiap kegiatan. Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga diharapkan bisa menjabarkan kebijakan dan langkah-langkah strategis, yang dapat diimplementasikan sesuai peran dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pihak



terkait, sekaligus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 ini, di samping menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, juga dapat digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa besar pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Perubahan lingkungan strategis memaksa mengembangkan pemerintah untuk merespon segala bentuk perubahan melalui upaya infrastruktur pendukung khususnya aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur dan struktur pembiayaan disertai dengan operasionalisasi konsep otonomi yang jelas, sistimatis dan terukur.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu Biro yang menerima pendelegasian wewenang dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sehingga dapat secara optimal memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kondisi pandemik virus Covid-19 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berupaya bekerja secara optimal untuk melaksanakan dan memenuhi target perencanaan dan kinerja yang ada meskipun dengan segala keterbatasan akibat adanya pandemik virus Covid-19 yang mempengaruhi segala sendi aktivitas pemerintahan.

Beberapa pertimbangan diatas diharapkan mendapat dukungan anggaran yang lebih maksimal, sehingga dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi dan kewenangan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah didasarkan pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 32. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 33. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023



- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301),
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1 Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunandaerah yang ada di didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
- 2 Agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang akuntabel untuk menjadi pedoman bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menganggarkan program/kegiatan pada tahun 2023.
- 3 Agar tersedia rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indicator kinerja yang ingin dicapai terkait urusan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi pedoman bersama dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pemerintahan tahun 2023.

Secara umum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 berupaya merumuskan kebijakan dan program kegiatan yang lebih mengarah pada pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023.

Agar dapat mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Adapun upaya dan langkah



strategi dalam mendukung pencapaian sasaran secara berkesinambungan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelayananan Sekertariat Daerah di bidang pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, factor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan yang merupakan pernyataan atau keinginan atas suatu keadaan masa depan yang akan dicapai. Yaitu penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi organisasi yang memberikan gambaran mengenai sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun atau lebih. Adapun rumusan tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ingin dicapai adalah :

- a. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Adapun penentuan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelayananan Sekertariat Daerah di bidang pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah



1.4 Sistematika Penulisan

Penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan muatan kondisi lingkungan Strategi dalam satu kesatuan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya



pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dengan format tabel T-C.30.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
4. Lampirkan tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian



lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



- d. Table rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Pada tahun anggaran 2021, terdapat 2 Program dan 8 Kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan realisasi Capaian Kinerja kegiatan sebesar **95,91%**. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021, dibawah ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 162.864.400,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun dengan anggaran Rp. 115.474.900 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 113.532.700,- atau 98,32 %;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun dan terkoordinasi dengan anggaran Rp. 47.389.500 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 47.389.500,- atau 100,00 %;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 533.663.700,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia dengan anggaran Rp. 130.900.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 129.550.000,00 atau 98,97 %;
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia dengan anggaran Rp.



- 10.076.700,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 10.076.700,00 atau 100,00 %;
- c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang dihadiri dengan anggaran Rp. 392.687.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 386.363.518,00 atau 98,39%;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 0,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Jumlah Peserta Bimtek Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 0,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 0,00,- atau 100%;
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 0,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 0,00,- atau 100%;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 165.981.024,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp.165.981.024,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 165.981.024,00,- atau 100,00 %;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 87.424.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara Bebas Pajak dengan anggaran Rp. 28.814.000,00 dapat terealisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 25.464.650,00,- atau 88,38%;



- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak perizinan kendaraan dengan anggaran Rp. 48.692.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 40.319.518,00,- atau 82,81%;
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara/direhabilitasi dengan anggaran Rp. 9.918.000,00 dapat terealisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 9.862.500,00,- atau 99,44 %;

B. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 771.092.300,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
 - a) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Jumlah Jenis Dokumen Lkpj Yang Disampaikan Tepat Waktu Ke DPRD dan Jumlah LPPD Yang di Hasilkan dengan anggaran Rp.263.738.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 247.637.450,00,- atau 93,90%;
 - b) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab/Kota dan Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi SulSel dengan anggaran Rp. 203.329.300,00 dapat terealisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 190.162.900,00,- atau 93,52%;
 - c) Fasilitasi Penataan Wilayah, Jumlah Segmen Batas Kab / Kota Yang Di Fasilitasi dengan anggaran Rp. 304.025.000,00 dapat terealisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 300.890.298,00,- atau 98,97%
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan pagu anggaran Rp.620.338.800,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :



- a) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Fasilitasi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan KDH/WKDH, Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penerbitan SK Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota dengan anggaran Rp. 187.254.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 181.468.531,00,- atau 96,91%;
 - b) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, Jumlah Kab/Kota Yang di Fasilitasi dalam Rangka HUT Kab/Kota dengan anggaran Rp. 67.541.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 67.541.000,00,- atau 100,00 %;
 - c) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Jumlah Kab/Kota Yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan di Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.365.543.800,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 333.383.800,00,- atau 91,20%;
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 253.930.300,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
- a) Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah, Jumlah MoU / PKS Yang Di Fasilitasi dengan anggaran Rp. 77.280.300,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 73.036.000,00,- atau 94,51%;
 - b) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan anggaran Rp. 0,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 0,00,- atau 100%;
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, Monitoring Tindak Lanjut MoU/PKS dengan anggaran Rp.16.040.000,00 dapat terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 12.340.000,00,- atau 76,93 %;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta pencapaian Renstra Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.29



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah S/d Tahun 2023	
					Target Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = 5=7=9)	11 = (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN Pemerintahan									
4	01 SEKRETARIAT DAERAH									
4	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

					Perangkat Daerah									
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
						Jumlah Dokumen Renja Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah RKA Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Dokumen CALK yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	10 Paket	12 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	10 Paket	100%
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Paket	100%
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jamuan Makan Minum yang tersedia	10 Laporan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	10 Laporan	100%
						Jumlah Perjalanan Dinas	30 Laporan	145 Kali	149 Kali	149 Kali	100%	160 Kali	30 Laporan	100%
						Jumlah Peserta Rapat	10 Laporan	100 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	400 Orang	10 Laporan	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4	01	01	1.05		Administrasi Kependagawaian Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Peserta Aparatur yang mengikuti Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	168 Orang	100 Orang	-	100%	100 Orang	300 Orang	100%
4	01	01	1.05		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	168 Orang	100 Orang	-	100%	100 Orang	300 Orang	100%
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	18 Laporan	24 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	18 Laporan	100%
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Dinas yang dipelihara	8 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	8 Unit	100%
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	20 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	14 Unit	20 Unit	100%



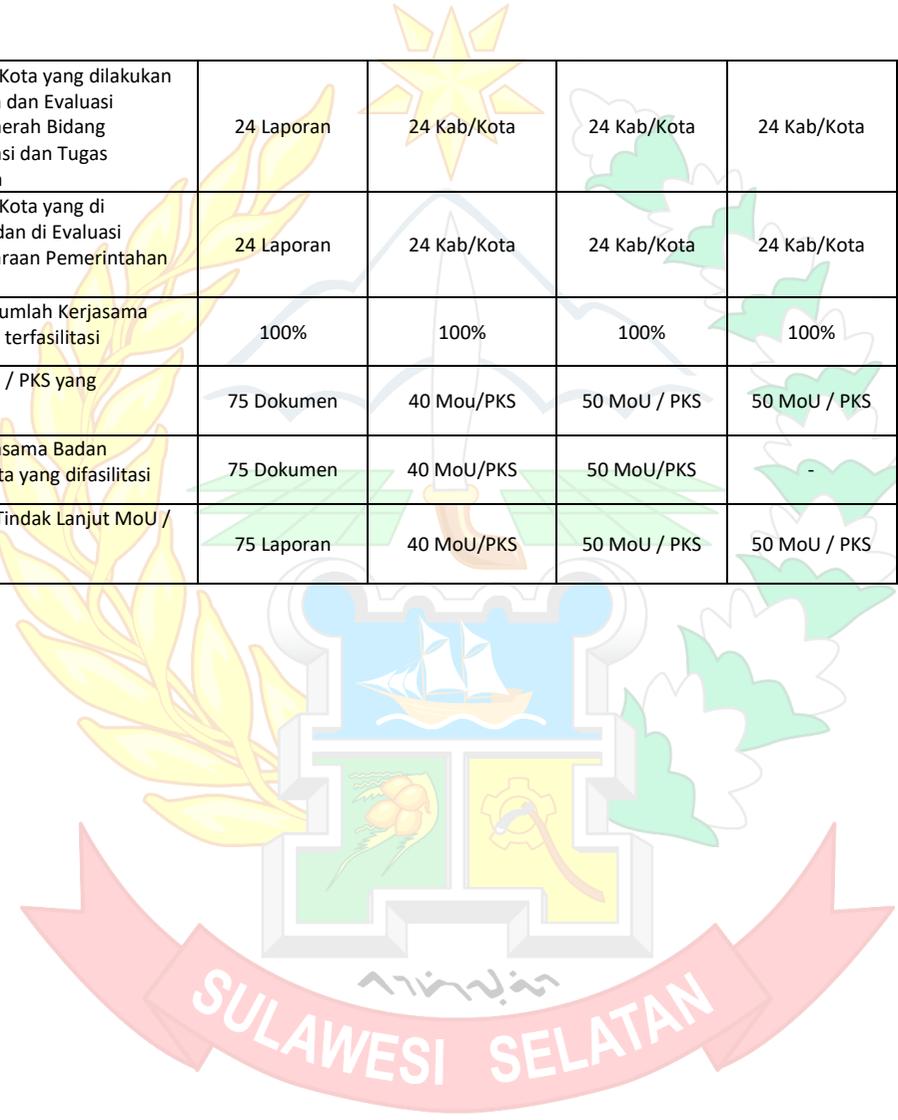
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Cangkupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Jenis Dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen / Laporan	2 Dokumen / Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah LPPD yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Segmen batas yang difasilitasi	8 Dokumen	24 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100%	4 Kab/Kota	8 Dokumen	100%
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase Kab/Kota yang difasilitasi dan dimonitoring Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan KDH/WKDH	5 Dokumen	30 SK	12 SK	12 SK	100%	1 SK	5 Dokumen	100%
						Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	5 Dokumen	30 SK	12 SK	12 SK	100%	1 SK	5 Dokumen	100%
						Penerbitan SK Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	3 Dokumen	30 SK	10 SK	10 SK	100%	12 SK	3 Dokumen	100%
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka HUT Kab/Kota	24 Dokumen	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100%	24 Kab/Kota	24 Dokumen	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	24 Laporan	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100%	24 Kab/Kota	24 Laporan	100%
					Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan di Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100%	24 Kab/Kota	24 Laporan	100%	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase Jumlah Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah MoU / PKS yang difasilitasi	75 Dokumen	40 Mou/PKS	50 MoU / PKS	50 MoU / PKS	100%	75 MoU / PKS	75 Dokumen	100%
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi	75 Dokumen	40 MoU/PKS	50 MoU/PKS	-	100%	75 MoU / PKS	100 Dokumen	100%
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Monitoring Tindak Lanjut MoU / PKS	75 Laporan	40 MoU/PKS	50 MoU / PKS	50 MoU / PKS	100%	75 MoU / PKS	75 Laporan	100%





TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						
			Target Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	6	7	8= (7/6)				
3.00	Fungsi Penunjang Pemerintahan								
3.00	06	Sekretariat Daerah							
3.00	06	01.02	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
3.00	06	01.02	11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN	Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	
					Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota	100 %	100 %	100 %	
					Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	
					Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	
3.00	06	01.02	11	001	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah jenis dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	2 jenis	2 jenis	100 %
3.00	06	01.02	11	002	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi e-LPPD yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100 %
						Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	0 aplikasi	0 aplikasi	100 %
						Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3.00	06	01.02	11	004	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Lingkup Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	168 orang	168 orang	100 %
3.00	06	01.02	11	007	Monitoring Penyusunan LPPD/LKPJ Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100 %
3.00	06	01.02	11	008	Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja	Jumlah kunjungan kerja anggota MPR, DPR/DPD RI, Watimpres dan DPRD Provinsi lain yang difasilitasi	140 Kunjungan Kerja	140 kunjungan kerja	100 %
3.00	06	01.02	11	009	Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	24 Kab/Kota di Sulsel	24 Kab/Kota di Sulsel	100 %
3.00	06	01.02	11	010	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan	Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya	6 SKPD Provinsi	6 SKPD Provinsi	100 %



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

					Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan	Jumlah SKPD Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100 %
3.00	06	01.02	11	011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100 %
3.00	06	01.02	11	014	Penyusunan Administrasi Pejabat Negara dan Daerah	Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH	30 SK	30 SK	100 %
						Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakilkota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi	30 SK/PAW	30 SK/PAW	100 %
						Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota	30 SK	30 SK	100 %
3.00	06	01.02	13		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
3.00	06	01.02	13	001	Penataan Penyelenggaraan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Jumlah peserta rapat koordinasi peran Gubernur di tingkat Prov. Sulsel	72 orang	72 orang	100 %
3.00	06	01.02	14		PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH	Peningkatan jumlah kerjasama daerah	150 MoU	200 MoU	150 %
3.00	06	01.02	14	001	Pelayanan Administrasi Kerjasama Daerah	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	40 MoU/Pks	272 MoU/Pks	200 %
3.00	06	01.02	22		PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA	% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %
3.00	06	01.02	22	001	Penegasan Batas Antara Kabupaten/ Kota dan Provinsi	Tertib Administrasi Penegasan Batas Daerah Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	100 %
3.00	06	01.02	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
3.00	06	01.02	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	24 orang	24 orang	100 %
3.00	06	01.02	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	60 jenis ATK	60 Jenis ATK	100 %
3.00	06	01.02	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	7 jenis	7 jenis	100 %
3.00	06	01.02	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	135 kali	100 kali	75 %



3.00	06	01.02	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %
3.00	06	01.02	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	9 unit	9 unit	100 %
3.00	06	01.02	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	5 Unit	50 %
3.00	06	01.02	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	100 %
3.00	06	01.02	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.00	06	01.02	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pada tahun 2023, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 2 Program, 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk menjabarkan program-program tersebut. Untuk setiap program telah ditargetkan capaian kerjanya. Berikut adalah program-program yang akan dilaksanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%
 - Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan target capaian 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100%.
 - Fasilitasi Kerjasama dengan target capaian kinerja 100% pada tahun 2023 dan proyeksi target capaian di tahun 2023 sebesar 100 %



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		√	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	√		2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	√		5	7	9	16	5	7	9	16	
6	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	√		2	2	2	2	2	2	2	2	
7	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri	√		400	501	600	900	400	501	600	900	
8	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	√		5	5	5	5	5	5	5	5	
9	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	√		1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak perizinan kendaraan	√		7	7	7	7	7	7	7	7	
11	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	√		9	11	14	20	9	11	14	20	
12	Jumlah jenis dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	√		2	2	2	2	2	2	2	2	
13	Jumlah LPPD Yang Dihasilkan	√		2	2	2	2	2	2	2	2	
14	Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab / Kota		√	1	1	1	1	1	1	1	1	



15	Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		√	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Jumlah Usulan Batas Wilayah Kab / Kota Yang Di Fasilitasi	√		2	2	4	8	2	2	4	8	
17	Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakil kota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi	√		12	12	1	12	12	12	1	12	
18	Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota	√		8	10	12	14	8	10	12	14	
19	Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH	√		12	12	1	12	12	12	1	12	
20	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	√		24	24	24		24	24	24	24	
21	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	√		24	24	24	24	24	24	24	24	
22	Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√		24	24	24	24	24	24	24	24	
23	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	√		30	50	70	100	30	50	70	100	
24	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	√		30	50	70	100	30	50	70	100	
25	Monitoring Tindak Lanjut MoU/PKS	√		30	50	70	100	30	50	70	100	





2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Agar dapat menapak kedepan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradig baru sebagai katalisator perubahan yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikan paradig baru tersebut, dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi kepada seluruh komponen sumber daya aparatur di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Paradigma baru tersebut merupakan redefinisi fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel..

Adapun Hambatan yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Pandemic Covid – 19 masih menjadi hambatan untuk Tahun 2023 yang dimana menghambat ruang gerak dan akses baik itu ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
2. Permasalahan batas wilayah menjadi agenda utama di Tahun 2023 yang dimana pada Tahun 2022 sudah mulai dilakukan penyelesaian dan diharapkan Tahun 2023 masalah segmen batas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terselesaikan dengan tuntas.
3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan tiap tahunnya.
4. Belum optimalnya sarana penunjang bagi aparat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk melaksanakan Tugas dan Pekerjaan masing-masing di tiap-tiap bidang.
5. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah yang menjadi agenda besar yang akan diselenggarakan oleh semua Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.

Pandemic Covid-19 masih menjadi perhatian khusus dalam kehidupan Pemerintahan atau dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terus berupaya bekerja secara optimal



meskipun dalam keterbatasan Pandemic Covid-19 yang tentu saja memberikan efek terhadap pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Untuk menjawab segala tantangan dan perubahan paradigma tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi yang mengacu kepada Visi dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersinergi, dan Akuntabel

Misi merupakan pernyataan tindakan yang diemban dan harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Agar dapat merealisasikan Visi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

“Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif”

Dengan Visi Misi tersebut maka isu strategis yang dapat dikembangkan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, program dan kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal sebagaimana telah diusulkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari segi Jumlah Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Target Indikator kinerja serta Pagu Indikatif untuk masing-masing Program dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak **2 (Dua) Program**, yang terdiri atas **8 (Delapan) Kegiatan**, dan **20 (Dua puluh) Sub Kegiatan**
- Pagu Indikatif / Kebutuhan Dana sebesar **Rp. 4.677.581.992,-**
(Dapat dilihat pada Tabel T-C.31)



Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah				4.677.581.992					4.677.581.992	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				2.593.872.092	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				2.593.872.092	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.658.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.658.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun	10 dokumen	249.274.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun	10 dokumen	249.274.300	





RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	101.384.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	101.384.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300 Orang	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.198.121.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.198.121.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	348.213.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	348.213.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	829.907.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	829.907.600	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.582.192	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.582.192	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	477.582.192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	477.582.192	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				567.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				567.510.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95.710.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95.710.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	350.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	350.400.000	

SULAWESI SELATAN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	121.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	121.400.000	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2.083.709.900	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2.083.709.900	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				762.723.400	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				762.723.400	
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	241.431.400	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	241.431.400	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	200.000.000	
Fasilitasi Penataan Wilayah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	8 Dokumen	321.292.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	8 Dokumen	321.292.000	
Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.020.986.900	Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.020.986.900	
Fasilitasi Administrasi kepala Daerah dan DPRD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	20 Dokumen	379.999.900	Fasilitasi Administrasi kepala Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	20 Dokumen	379.999.900	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	99.999.700	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	99.999.700	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	540.987.300	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	540.987.300	
Fasilitasi Kerjasama Daerah				299.999.600	Fasilitasi Kerjasama Daerah				299.999.600	
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	100 Dokumen	149.999.700	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	100 Dokumen	149.999.700	
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	100 Dokumen	49.999.900	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	100 Dokumen	49.999.900	
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	100 Laporan	100.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	100 Laporan	100.000.000	
JUMLAH				4.677.581.992					4.677.581.992	





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat Program dan Kegiatan yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Program dan Kegiatan tersebut diperoleh dari usulan yang ada dari para pemangku kepentingan dan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi. Adapun usulan tersebut juga berasal dari usulan Musrenbang Kab/Kota yang diakomodir oleh Pemerintah Provinsi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah antara lain :

1. Rendahnya Pemahaman OPD terhadap Penyusunan dokumen LPPD dan belum efektifnya penyusunan data LPPD
2. Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD
3. Masih kurangnya pembinaan tentang EPPD
4. Terhambatnya proses penyelesaian segmen batas wilayah kab/kota dan masih banyaknya konflik antar batas wilayah

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
	Sekretariat Daerah				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun	10 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	2 Dokumen	



			Kebijakan Pemerintahan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	8 Dokumen	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	Fasilitasi Administrasi kepala Daerah dan DPRD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	20 Dokumen	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	100 Dokumen	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	100 Dokumen	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Makassar	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	100 Laporan	





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi serta melaksanakan Misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Guna mendukung Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Unit Kerja dalam menunjang pelaksanaan tatakelola Pemerintahan Sekretariat Daerah mendukung Misi pertama yaitu "*Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif*" dan Misi empat (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. melalui Reformasi Birokrasi serta dalam hal mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien dan mewujudkan percepatan pelaksanaan pembangunan. Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah dirumuskan bersama adalah:

1. Meningkatkan efektifitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah.
2. Mengembangkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter.



Adapun rumusan tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ingin dicapai adalah :

1. Pengembangan kondisi optimal penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan dukungan optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah serta kelembagaan masyarakat secara harmonis, bersinergi dan berbudaya;
2. Optimalisasi hubungan kemitraan antar Lembaga Eksekutif Daerah dengan Lembaga Legislatif Daerah untuk mendukung daya guna dan hasil guna pelaksanaan Otonomi Daerah;
3. Pengembangan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju akuntabilitas publik;
4. Optimalisasi fungsi fasilitasi dalam rangka penataan Daerah Otonom serta pemberian fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan awal pemerintahan;
5. Meningkatnya kerjasama antar kabupaten / kota serta sinergitas nasional dan global;
6. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan yang terpadu dan terkoordinasi untuk menunjang pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Meningkatnya kepastian hukum terkait dengan batas provinsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib dan terorganisasi;
8. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan legitimasi kelembagaan pemerintahan daerah sehingga mekanisme pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum.
2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang perumusan kebijakan



penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa.

3. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas dan Administrasi Pimpinan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
5. Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

Adapun sasaran untuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya penatausahaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan dukungan optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah serta kelembagaan masyarakat secara harmonis, bersinergi dan berbudaya;
3. Terwujudnya hubungan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah yang sinergis;
4. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju perwujudan akuntabilitas publik;
5. Intensifikasi fungsi fasilitasi penataan daerah otonom dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan awal pemerintahan;
6. Terlaksananya penegasan batas daerah Provinsi dan batas antar Kabupaten / Kota;
7. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri;



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jika dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dalam pengelolaan dan penentuan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Program dan kegiatan yang dirancang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. **2.593.872.092** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **350.658.800** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 249.274.300 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 101.384.500 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 0 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran Rp. 0 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran Rp. 0 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **1.198.121.100** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :



- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 348.213.500 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 829.907.600 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **477.582.192** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 477.582.192 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **567.510.000** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 95.710.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 350.400.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 121.400.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

B. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **2.083.709.900** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. **762.723.400** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :



- a) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan dengan pagu anggaran Rp. 241.431.400 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c) Fasilitasi Penataan Wilayah dengan pagu anggaran Rp. 321.292.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **1.020.986.900** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
- a) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan pagu anggaran Rp. 379.999.900 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dengan pagu anggaran Rp. 99.999.700 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu anggaran Rp. 540.987.300 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan pagu anggaran Rp. **299.999.600** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub kegiatan :
- a) Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah dengan pagu anggaran Rp. 149.999.700 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan pagu anggaran Rp. 49.999.900 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.33



T-C.33

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

UNIT ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.28.00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.28.00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01		SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7.564.749.061			
4	01	01	1.01		2.593.872.092			3.914.749.061				
4	01	01	1.01		350.658.800			464.749.061				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun	Kota Makassar	10 Dokumen	249.274.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Dokumen	364.749.061
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	2 Dokumen	101.384.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	100.000.000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0			1.200.000.000
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Kota Makassar	300 Orang	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300 Orang	600.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	300 Orang	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300 Orang	600.000.000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.198.121.100				1.550.000.000
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	10 Paket	348.213.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Paket	500.000.000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Makassar	2 Paket	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Paket	50.000.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	50 Laporan	829.907.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50 Laporan	1.000.000.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.582.192				200.000.000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Makassar	5 Laporan	477.582.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Laporan	200.000.000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				567.510.000				500.000.000
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Makassar	1 Unit	95.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	100.000.000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Makassar	8 Unit	350.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Unit	300.000.000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	121.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 Unit	100.000.000	
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2.083.709.900				3.650.000.000
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				762.723.400				1.400.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kota Makassar	2 Dokumen	241.431.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	500.000.000
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kota Makassar	1 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	400.000.000
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Kota Makassar	8 Dokumen	321.292.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Dokumen	500.000.000
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.020.986.900				1.200.000.000
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kota Makassar	20 Dokumen	379.999.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Dokumen	500.000.000
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kota Makassar	24 Dokumen	99.999.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Dokumen	300.000.000
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Makassar	24 Laporan	540.987.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	400.000.000
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah				299.999.600				1.050.000.000
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang difasilitasi	Kota Makassar	100 Dokumen	149.999.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Dokumen	500.000.000
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang di fasilitasi	Kota Makassar	100 Dokumen	49.999.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Dokumen	250.000.000
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama yang dievaluasi	Kota Makassar	100 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Laporan	300.000.000
Jumlah									4.677.581.992				7.564.749.061





BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan tata pemerintahan dan otonomi daerah yang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan *good governance* sesuai tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah program tahunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, Renja juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak dapat dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik yang membangun, khususnya segenap personil pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan demi tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan Misi organisasi dan menopang keberhasilan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu perangkat yang mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu Gubernur khususnya dalam bidang Pemerintahan secara umum.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, kami susun secara objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.



Makassar, 2022
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH

IDHAM KADIR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19790113 200003 1 002

